

**RESENSI BUKU: FRANS HUSKEN (1998)**  
**MASYARAKAT DESA DALAM PERUBAHAN ZAMAN:**  
**Sejarah Difrensiasi Sosial di Jawa**



*Oleh: Mustainah Mappatoba*

**ABSTRAK**

*Masyarakat desa dalam Perubahan zaman yang ditulis oleh Frans Husken adalah sebuah kajian hasil penelitian antropologis yang memadukan dengan disiplin ilmu-ilmu social yang lainnya terutama sosiologi dan sejarah. Penulisan buku ini sebearnya baru dimulai pada tahun 1974 dimana kali pertama Frans Husken mengunjungi Indonesia untuk persiapan penelitian. Namun secara intensip baru dilakukan dari tahun 1975 – 1978, dan berhasil dipertahankan sebagai tesis Ph.D di Universitas Amsterdam pada tahun 1988. Salah satu hal yang menarik perhatian peneliti tidak hanya merekam berbagai perubahan yang terjadi di pedesaan Jawa, tetapi juga karena menempatkan penelitiannya dalam perspektif dan kurun waktu setengah abad (1830-1980).*

**Key Word:** *Masyarakat Desa, Perubahan Frans Husken*

**PENDAHULUAN**

Salah satu hal yang menarik dari hasil penelitian Frans Husken adalah kemampuannya untuk merekam berbagai kejadian penting dalam sejarah Indonesia, seperti dari zaman penjajahan (halaman 16-25) Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan, Nasionalisasi Perusahaan Asing (1958) sampai pergeseran kepemimpinan dari Sukarno ke Suharto.

Frans Husken juga membatah beberapa tulisan sebelumnya seperti Raffles, Du Bus ; (17-18), Boeke:(27), dan Geertz (32) yang semuanya dalam nada yang sama melukiskan pedesaan Jawa sebagai suatu masyarakat “pasca-tradisional”, egaliter, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. (subsistensi), dan semua itu mereka anggap sebagai factor yang menghambat modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Frans Husken bahwa ternyata dari sejarah Gondosari dapat diketahui bahwa proses komersialisasi dan difrensiasi social sudah berjalan jauh sebelumnya. Data dari apsip desa diketahui bahwa 1850 penduduk Gondosari sudah terbagi kedalam tiga kelas utama :- golongan besar para tuna kisma yang hidupnya tergantung dan terikat pada keluarga-keluarga petani penguasa tanah, sebagian dari tunakisma itu juga terdiri dari buruh tani musiman yang bebas dan dating dari desa-desa lain: Kedua golongan petani kelas menengah (orang kuat desa) yang mendapat pembagian tanah tetapi dibebani bermacam kerja rodi dan kerja pancen: dan golongan yang ketiga kelas atas yang terdiri dari para anggota pemerintahan desa yang selain memiliki tanah sendiri dan mendapat tanah bengkok yang cukup luas juga berkuasa mengarahkan tenaga

kerja pancen (orang-orang kuat) untuk mengerjakan tanah – tanah mereka. Pada pertengahan abad ke – 19 upah kerja dan bagi hasil sudah dikenal di desa itu.

Husken menggaris bawahi keberadaan struktur sosial masyarakat Jawa dan difensiasinya dari zaman ke zaman selalu dipengaruhi oleh keberadaan mode of production yang bertumpu atas tanah. Dalam penjelasan pentingnya tanah dalam membentuk struktur Jawa, Husken memulai dengan menjelaskan tentang anjuran memanfaatkan tanah secara optimal dan sedapat mungkin memperluas lahan pertanian yang disampaikan oleh Raja Wengker jauh sebelum zaman kolonial di Pulau Jawa dan sebelum pulau Jawa kekurangan tanah.

Amanat atas tanah ini menjadi terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam kebijakan pemerintah, sehingga, perhatian atas tanah selalu dikaitkan dengan kondisi struktur masyarakat. Tanah menjadi sumber utama kemakmuran ekonomi, ketertiban dan keamanan masyarakatnya. Upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban didaerahnya tersebut masih terus dipikul oleh pemerintah sampai sekarang. Setidaknya dilihat dari kebijakan pembangunan dan pandangannya tentang pertanian

### **PENTINGNYA SEJARAH DALAM ANALISA SOSIOLOGI**

Sekalipun tulisan Husken merupakan karya Antropologi, namun dalam membahas tulisannya tersebut, Husken menggunakan pendekatan kesejarahan. Frans Husken menerapkan pendekatan lintas disiplin dalam mengulas perubahan politik, sosial dan ekonomi melintasi tiga zaman:

1. Penjajahan Belanda
2. Penjajahan Jepang
3. Masa Kemerdekaan RI

Namun dalam beberapa pembahasan, perodesasi ini tidak secara tegas memisahkan antar zaman, melainkan terintegrasi dengan temuan data secara keseluruhan yang tercermin dari kehidupan informan, baik yang menempati struktur sosial kelas atas (pemilik tanah/ tuan tanah) yang dibedakan berdasarkan paham politik yang dianut, misalnya Mbah Djojo tuan tanah yang berafiliasi terhadap politik Partai Golkar dan Haji Chalimi yang berafiliasi terhadap partai PPP partainya kaum santri, maupun tergambar dari informan yang menempati kelas bawah (tidak memiliki tanah pribadi melainkan hanya sebagai penggarap pada tanah-tanah tuan tanah), yang dibedakan atas riwayat hidup informan yang bersangkutan termasuk pengaruh politik terhadap kehidupannya, misalnya Kusno petani penggarap yang menjadi miskin (kelas bawah) karena korban politik yaitu dulunya dia sebagai penganut PKI dan ketika politik bergeser, PKI tidak lagi diberi tempat, maka kehidupan Kusnupun menjadi berubah, menjadi petani penggarah di tanah yang dulu menjadi miliknya. Contoh lain adalah Tolib yang sejak kecil sudah yatim piatu dan dibesarkan di madrasah dan akhirnya menjadi aktivis NU serta berafiliasi terhadap partai politik PPP karena mengikuti afiliasi politik tuan tanahnya yaitu Haji Chalimi.

Dalam menggambarkan periode sejarah ini ada kalanya Husken membagi dalam periodisasi berikut: pada masa kolonial (sebelum kemerdekaan), masa awal kemerdekaan, zaman Rezim Sukarno dengan kebijakan land reformnya, zaman Rezim Soeharto dengan kebijakan revolusi hijau, dan perkembangan masyarakat setelah periode tersebut.

Bagaimana pentingnya sejarah dalam analisa Husken tergambar dari bagaimana Husken menjelaskan berbagai kejadian dalam sejarah Indonesia, seperti: Perang dunia II, Proklamasi RI, Nasionalisasi Perusahaan Asing (1958), sampai perubahan pemerintahan di bawah Sukarno ke Suharto mempengaruhi masyarakat Gondosari terutama dalam hal perkembangan demografis, menyusutnya tanah pertanian, proses pelebagaan dan kemiskinan di kalangan petani kecil dan buruh tani. Sehingga bukan hanya tergambar aspek struktur sosial saja, melainkan juga tergambar segi-segi politik, sosial ekonomi dan ekologi masyarakat Jawa.

Dilihat dari periodisasi sejarah, dapat digambarkan beberapa kondisi masyarakat Jawa. Pada tahun 1920-an, masyarakat Jawa sudah terdiferensiasi ke dalam dua kategori yaitu petani maju dan petani miskin. Petani yang dikatakan maju itu sudah mendapat kesempatan pada saat pemerintah kolonial mencoba membentuk suatu lapisan kelas menengah pedesaan yang kuat. Hal ini berkaitan dengan adanya skenario politik ekonomi makro dengan skenario sosial mikro.

Di tahun 1930, krisis ekonomi melanda dunia, berawal di Eropa dan Amerika, tahun 1932 pabrik gula tidak menyewa tanah lagi, tahun 1933 memecat semua pekerja tetap, harga kapok yang merupakan produksi pertanian rakyat turun anjlok hingga 80% penduduk kehilangan sumber penghasilan dan kesejahteraan berkurang. Kondisi ini menyebabkan terjadinya diferensiasi sosial yang baru, beberapa petani yang tadinya mendapatkan sumber penghasilan dari kapok atau bekerja di pabrik gula menjadi kehilangan sumber pendapatannya dan merubah status sosial mereka yang tadinya menempati struktur sosial sebagai petani yang maju, berubah menjadi petani miskin. Terjadi pergeseran jumlah dimana petani miskin menjadisemakin banyak.

Tahun 1942, pendudukan Jepang, kesengsaraan rakyat bertambah karena seperempat sampai sepertiga panen padi disita oleh penguasa Jepang guna memasok bahan pangan untuk tentaranya. Kondisi inipun merubah struktur sosial masyarakat Jawa dimana kelas bawah menjadi semakin lebar (banyak).

Pada zaman kemerdekaan setelah berakhir pendudukan Jepang dan perang dunia ke II, terjadi mekanisme diferensiasi sosial yang diakibatkan oleh komersialisasi dan akumulasi penguasaan tanah, modernisasi pertanian dan pertikaian politik lokal sebagai pencerminan dari proses-proses di tingkat nasional. Pada zaman ini terjadi pergeseran kembali dalam struktur sosial masyarakat Jawa. Tahun 1958, pemerintah mengambil keputusan menasionalisasikan perusahaan Belanda kemudian dikelola oleh perusahaan negara. Selain rasionalisasi perusahaan Asing/ Belanda, pada tahun 1960-1965 juga terjadi pendistribusian kembali tanah berdasarkan UUPA 1960, dimana pada masa ini terjadi pergeseran sosial budaya. Pada tahun sebelum 1965,

orang komunis berkuasa, ketika itu ada saja timbul sengketa antara petani pemilik tanah dengan petani penggarap yang dihasut oleh kaum komunis mereka banyak menuntut tetapi sedikit memberi. Keadaan ini membentuk adanya diferensiasi sosial dimana penganut partai komunis mendapat tempat yang lebih bagus dalam hal kepemilikan tanah. Tanah-tanah tuan tanah dirasionalisasi berdasarkan undang-undang pokok agrarian UUPA 1960 dan dibagi-bagikan kepada rakyat (petani tidak punya tanah).

Alih kekuasaan oleh kaum militer pada bulan oktober 1965 mengakibatkan terjadinya pengejaran terhadap kaum komunis dan simpatisannya. Perubahan politik ini telah merubah peta petani kaya dan miskin. Petani kaya yang pada waktu kejayaan komunis ikut dalam partai politik komunis, setelah era 1965 an mengalami kejatuhan, sehingga berubah status menjadi petani miskin/ penggarap. Dalam hal perjanjian bagi hasil juga terjadi perubahan yang biasanya 40-50 % (limoloro, maro) untuk penggarap, sekarang hanya 1/3 (morotelu). Kondisi ini semakin memperparah tingkat ekonomi petani penggarap (miskin) dan membuat petani kaya semakin kaya.

Dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan, Rezim orde baru juga telah melibatkan adanya campur tangan/ keterlibatan angkatan bersenjata yang disebutnya dwi fungsi ABRI dalam rangka membantu tercapainya swasembada pangan melalui revolusi hijau. Tahun 1966, terjadi perubahan strategi pembangunan termasuk pembangunan pertanian, dari usaha pembenahan keseimbangan antara *land, labor and capital* langsung ke modernisasi dan intensifikasi di sektor tersebut guna meningkatkan produksi pangan dan mengefisienkan perkebunan besar. Disebut periode revolusi hijau tanpa mengubah struktur agraria langsung melangkah ke modernisasi dan intensifikasi pertanian. Pada masa ini, tuan tanah menerapkan teknologi baru, mempunyai sawah dengan irigasi dan sukses jenis padi baru, mudah mendapat akses kredit dan mudah menyediakan keperluan lainnya terkait dengan program itu, terutama pupuk buatan dan insektisida. Dengan begitu mereka berada dalam posisi ekonomi yang memungkinkan untuk berani mengambil resiko. Petani-petani kaya ini melakukan penghematan dalam biaya tenaga kerja di pesawahan melalui ‘rasionalisasi’ dalam penanaman padi dan panen sehingga penghasilan bersih mereka pada tahun-tahun revolusi hijau semakin tinggi.

Revolusi hijau Indonesia terhadap pedesaan di Jawa cenderung menganggap modernisasi pertanian sebagai terobosan radikal ke arah diferensiasi sosial dan sebagai pemutusan langsung dari teori lama involusi. Suatu masyarakat desa pasca tradisional yang stagnan dan didominasi oleh etos persamaan, diperkirakan akan dapat tercipta desa yang ditandai oleh komersialisasi produksi, hubungan kerja yang serba tertata dan polarisasi di bidang sosial ekonomi. Sifat pemerintahan orde baru dan mengalirnya petrodollar pada tahun 1970-an menjadi faktor penting yang berpengaruh atas perkembangan pertanian di pulau Jawa.

Dalam melihat masyarakat Jawa pada periodisasi ‘Revolusi Hijau’ ini, Husken merujuk pada beberapa tulisan peneliti sebelumnya. Namun secara kritis Husken memperlihatkan adanya kekeliruan dalam penelitian Revolusi Hijau terutama

mengenai “paradigma revolusi hijau“. Husken menuduh para peneliti tersebut telah secara sembrono menanggapi perspektif sejarah. sebagai pembanding dengan menggunakan gambaran pedesaan Jawa tahun 1950 dan 1960 seperti yang dilukiskan Geetz (1963), padahal kondisi masyarakat di dua zaman tersebut sangat berbeda.

Tinjauan sepintas kepustakaan colonial juga dilakukan oleh Husken guna menunjukkan bahwa berbagai macam peraturan tentang penghematan kerja dan mekanisme rasionalisasi yang banyak dibicarakan dikalangan pendukung paradigma revolusi hijau sudah dikenal sejak awal abad ke 20. Banyak masalah yang harus dibicarakan selain pembaharuan teknologi dan peningkatan produksi untuk pasar. Komersialisasi tanaman padi di Jawa tidak dapat dilihat terlepas dari perkembangan makro-sosial yang berlaku di Indonesia dalam beberapa dasawarsa setelah kemerdekaan. Penerapan teknologi hijau adalah satu bagian dari proses penyatuan ke dalam hubungan pasar yang bercirikan kapitalisme (Vessuri, 1980). Kenyataan laba dari teknologi baru itu terbagi secara tidak merata untuk keuntungan daerah yang lebih makmur di satu pihak dan petani kaya di pihak lain (Cleaver, 1971).

Revolusi hijau dilaksanakan senantiasa diiringi oleh efek diferensiasi serupa, namun dalam proses diferensiasi tahun 1970, telah ikut berperan berbagai factor lain yang erat kaitannya dengan situasi waktu dan iklim politik negeri Tahun 1975 pemerintah membagikan kredit kepada petani yang ingin menanam tebu di atas tanah sawah. Tahun 1985 diketahui akibat sampingan yang menyolok muncul sejumlah kecil petani tebu yang berhasil menguasai lahan yang luar biasa luasnya. Keadaan ini mengakibatkan kekurangan tanah garapan dalam skala besar. Hasil sensus tahun 1973 rata-rata luas usaha tani di Jawa tidak lebih dari 0,64 hektar dan dua per tiga dari seluruh usaha tani rata-rata kurang dari setengah hektar luasnya. Kondisi ini memunculkan adanya kelompok tuan tanah menunjukkan terjadinya suatu perubahan radikal dalam tatanan sosial pedesaan pulau Jawa.

Tahun 1984/1985 Indonesia mencapai swasembada pangan, namun hanya petani kaya yang menerima keuntungan besar sedangkan petani kecil dan buruh tani terdesak keluar sektor pertanian dan terpaksa mencari nafkah di sektor informal di perkotaan. Transformasi ekonomi pedesaan abad ke 20 kemudian menginterpretasikan sifat perubahan agraria yang telah mengalami pertumbuhan cepat selama sepuluh tahun terakhir dan selanjutnya membahas latar belakang politik yang telah mempengaruhi strategi pembangunan pertanian dan pedesaan di Jawa.

Sejak Agustus 1997, kurs rupiah anjlok 75%, pekerja pada bidang industri di kota terkena PHK, kembali ke desa tanpa uang, Tahun 1998 meletus kerusuhan yang berkaitan dengan situasi pangan, dilaksanakannya pemasyarakatan teknologi dibidang agrobisnis dan agroindustri, namun teknologi pertanian tersebut menimbulkan ketegangan besar, kesempatan kerja di pedesaan menurun drastis, kesenjangan sosial antara petani kaya dan menengah di satu pihak dengan petani kecil dan buruh tani dipihak lain menjadi lebih lebar. Banyak orang pergi ke pusat industri dan jasa di perkotaan.

Dilihat dari aspek kesejarahan, bagaimana Husken menggambarkan masyarakat Jawa dari berbagai periode. Pada intinya dapat dikatakan setiap periode tersebut terdapat kebijakan ekonomi dan politik yang berbeda sehingga menimbulkan diferensiasi sosial yang dibedakan atas dua kelas yaitu pemilik (tuan tanah) dan petani miskin (tidak punya tanah) melainkan hanya sebagai penggarap dari tanah-tanah tuan tanah. Sekalipun terjadi pergeseran, perubahan struktur sosial, namun gejala tersebut selalu sama setiap periode yang berbeda adalah jumlah dari petani miskin dan kaya tersebut serta terjadinya perubahan status dari kaya menjadi miskin atau dari miskin menjadi kaya. Tetapi pada intinya tidak ada deferensiasi sosial yang mencolok yang menyebabkan timbulnya struktur sosial baru.

### **PENGARUH LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT**

Kebijakan ekonomi pada masa kolonial, khususnya sebelum tahun 1850, di Kawedanaan Tayu dikembangkan budidaya tebu untuk memasok pabrik gula yang memproduksi guna pasar internasional. Kebijakan ini bukan hanya merupakan kebijakan lokal tapi sudah mempertimbangkan adanya pengaruh internasional dalam kehidupan masyarakat Jawa dalam hal ini diwakili oleh masyarakat kawedanaan Tayu. Kebijakan ini telah merubah arti pentingnya Residensi Jepara. Bersamaan dengan masuknya ekonomi kapitalis timbul gejala komersialisasi yang meluas cepat di pedesaan. Dampak lebih lanjut adalah terjadinya diferensiasi sosial, akibat konversi penggunaan dan konsentrasi penguasaan tanah di tangan petani lapisan atas serta pemodal lain. Berangsur-angsur homogenitas masyarakat melemah dan timbulnya pelapisan sosial bahkan melebar kesenjangan antar lapisan sosial tadi. Pada gilirannya perkembangan ini menjadi lahan subur untuk gerakan rakyat serta merangsang perlawanan politik, baik di kalangan umat Islam maupun di lingkungan kaum buruh yang menuntut keadilan sosial.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan masyarakat dan terbentuknya diferensiasi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aspek lokal melainkan sudah dipengaruhi kebijakan nasional yang berorientasi pada pasar internasional.

### **PENGARUH POLITIK DAN EKONOMI TERHADAP DIFERENSIASI SOSIAL**

Dalam melihat diferensiasi sosial, Husken tidak dapat memisahkan diri dari keberadaan faktor-faktor lain terutama politik dan ekonomi. Politik praktis yang dijalankan masyarakat tidak terlepas dari ideologi yang dianut. Ideologi berkembang untuk membenarkan strategi perjuangan masing-masing golongan, yaitu umat Islam semakin menunjang Nahdatul Ulama sedangkan kaum buruh mendirikan serikat buruh Gula.

Dalam proses diferensiasi tersebut, berangsur-angsur kekuatan politik dan ekonomi di pedesaan beralih ke lapisan atas yang semakin menjalin hubungan erat dengan

pamong desa dan jajaran birokrasi atas desa. Desa Gondosari menjadi desa yang mencapai tingkat komersialisasi sehingga langsung terlibat dalam percaturan ekonomi yang lebih luas. Dalam kondisi seperti ini terjadi beberapa gejala sosial yaitu menajamnya diferensiasi antar lapisan di Desa Gondosari, terjadinya akumulasi tanah dan kesenjangan ekonomi semakin nyata menggejala.

Desa Gondosari, penguasaan atas aset tanah dan tenaga kerja yang menjadi penggerak utama proses diferensiasi dan kemudian menimbulkan pertentangan antar lapisan sosial di desa Perebutan yang terjadi mengenai penguasaan atas aset tanah dan tenaga kerja tidak terlepas dari pertumbuhan atau kemunduran industri gula.

## **PENUTUP**

Diferensiasi sosial yaitu gejala sosial yang terjadi sejak kapitalisme liberal menyusup ke dalam masyarakat desa. Dari banyaknya pengaruh kebijakan lokal, regional, nasionalo sampai internasional memberikan pengaruh semakin nyata terhadap timbulnya perbedaan antar lapisan dan pertentangan ekonomi maupun politik yang semakin tajam.

Kesenjangan yang meningkat ini dikaitkan dengan proses perubahan struktural yang lebih luas dalam masyarakat dan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan yang cepat dalam pertanian komersial, pertumbuhan relatif sektor non pertanian, seperti pertambangan dan industri ringan dan yang berkaitan dengan perubahan kebijaksanaan politik pemerintah (terutama birokrasi dan atau dominasi militer). Pengaruh transformasi politik dan ekonomi terhadap hubungan-hubungan daerah pedalaman, terutama pedesaan.

Dari berbagai pembahasan melalui pendekatan sejarah berdasarkan periodisasi sebelum dan sesudah kemerdekaan dapat dikatakan bahwa sebenarnya struktur sosial di pedesaan tidak banyak berubah, elit desa sebagai lapisan atas yang menguasai tanah luas tetap dominan, bahkan jumlah buruh tani tambah banyak, lapisan bawah melebar. Perluasan tanah garapan sudah tidak mungkin tanpa mengancam keadaan dan keseimbangan ekologi.

Sumber :

Frans Husken, 1998. *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980*, Grasindo, Jakarta

